

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikatnya manusia untuk mengatur apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Politik sendiri dalam pandangan klasik berfungsi untuk membicarakan dan menyelenggarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama atau kebaikan bersama¹. Untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat untuk sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi diperlukan kekuasaan. Dalam mencapai kebaikan bersama tersebut diperlukan peran negara yang memiliki kekuasaan untuk menggunakan paksaan yang sah. Kekuasaan yang sudah diperoleh tersebut digunakan sebagai kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum yang dilakukan oleh para elite politik.

Fenomena politik terjadi dalam banyak aspek kehidupan, salah satu aspek yang memiliki keterkaitan dengan politik antara lain adalah kebijakan. Kebijakan tidak pernah terlepas dengan kegiatan proses politik. Tiap-tiap proses dalam kebijakan itu sendiri memiliki aspek politik di dalamnya. Kebijakan publik terdiri dari nilai-nilai yang bersifat abstrak seperti keadilan, keamanan, kebebasan, persamaan, demokrasi, kepercayaan, kemanusiaan, nasionalisme, dan nilai-nilai yang konkret seperti pangan, sandang, papan dan lain sebagainya. Dalam

¹Surbakti, Ramlan, 2010, "Memahami Ilmu Politik", Jakarta, Grasindo hlm 3

kebijakan publik dapat ditemukan beberapa bidang seperti bidang kesejahteraan sosial (*social welfare*), bidang kesehatan, bidang perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional, ketahanan pangan (*food security*), ketahanan energi (*energy security*), transportasi (darat, laut, dan udara), lingkungan hidup dan lain sebagainya ². Kebijakan tersebut diambil dari masalah-masalah publik yang ada di masyarakat yang sudah dikaji dan terorganisir serta mendapatkan dukungan dari kalangan masyarakat dan kelompok kepentingan untuk mendapatkan tanggapan dari pembuat kebijakan.

Kebijakan sebagai salah satu dari sistem politik dapat berjalan dengan baik apabila sistem politik secara keseluruhan mendapatkan dukungan dari masyarakat, seperti penerimaan dan pengakuan. Menurut Andrain terdapat lima objek dalam sistem yang membutuhkan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung dan fungsional. Kelima objek legitimasi itu meliputi masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik dan kebijakan. Objek-objek tersebut memiliki hubungan yang kumulatif bila dilihat dari legitimasi sebagai dukungan dari masyarakat yang berarti jika objek pertama tidak mendapatkan dukungan maka objek selanjutnya tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat karena sifatnya yang hirarki. Kebijakan sebagai salah satu objek tidak akan berjalan dengan baik apabila objek-objek lainnya tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat.³

Cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu simbolis, materiil, dan

²Winarno, Budi, 2016, "*Kebijakan Publik Era Globalisasi*", Yogyakarta ,Center of Academic Publishing Service, hlm 18

³Surbakti, Ramlan, *Op.Cit.* hlm 119

prosedural. Cara tersebut dilakukan agar tidak terjadinya krisis legitimasi pada suatu negara yang dapat menyebabkan sistem politik yang tidak baik. Cara materil dalam mendapatkan legitimasi memiliki hubungan yang paling kuat dengan kebijakan. Materiil ditepuh dengan cara menjanjikan dan memberikan kesejahteraan materil terhadap masyarakat seperti menjamin ketersedianya kebutuhan dasar (*basic needs*), fasilitas kesehatan dan pemdidikan, sarana produksi pertanian, sarana komunikasi dan transportasi, kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan modal yang memadai⁴. Kesejahteraan materil untuk masyarakat tersebut dapat diperoleh melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan materil masyarakat. Dengan pemenuhan kebutuhan materil masyarakat tersebut dapat meningkatkan legitimasi terhadap sistem politik yang ada yang dapat berupa dukungan terhadap pemerintah.

Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik. Setiap kebijakan yang dibuat selalu sejalan dengan pertimbangan politik. Setiap langkah yang dilakukan oleh pembuat kebijakan senantiasa mengandung aspek politis di dalamnya. Meskipun sebuah masalah secara ekonomi layak dipecahkan, misalnya tetapi jika tidak menguntungkan secara politis maka para pembuat kebijakan seringkali mengurungkan niatnya⁵. Pertimbangan politik tidak dapat terlepas dengan kebijakan, bahkan kebijakan sosial yang berhubungan dengan masalah sosial. Hal tersebut dikarenakan adanya peran dari kelompok-kelompok kepentingan yang salah satunya terdiri dari aktor-aktor politik yang membuat kebijakan, sehingga terjadi tawar menawar didalam kebijakan itu sendiri

⁴*Ibid*, hlm 122

⁵Suharto, Edi, 2011, "*Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*", Bandung ,Alfabeta,hlm 28

khususnya kebijakan sosial. Kebijakan sosial bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan yang hendak dicapai. Secara eksplisit maupun implisit dasar negara Indonesia yaitu Pancasila mengamanatkan bahwa pemerintah wajib untuk memberi jaminan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia⁶. Kesejahteraan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan dan muara dari agenda pembangunan ekonomi Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan pasal mengenai perekonomian berada pada Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”. Menurut Sri-Edi Swasono (2001), “Dengan menempatkan pasal 33 di bawah judul Bab, maka “Kesejahteraan Sosial” itu, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial⁷. Perluasan tanggung jawab negara atas kesejahteraan sosial adalah ciri utama kehidupan sosial dan politik dewasa ini. Pemerintah-pemerintah di dunia telah ikut serta dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Intervensi tentang kesejahteraan sosial negara paling banyak dilaksanakan di negara-negara industri, khususnya di negara-negara Eropa Barat rata-rata mengeluarkan 25 persen dari GDP mereka untuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan pelayanan sosial lainnya. Walaupun negara berkembang tidak mengeluarkan sama banyak untuk program-

⁶Sutaryo dan kawan kawan, 2015, “*Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T)* (Kumpulan Makalah *Call for Papers* Kongres Pancasila VII), Yogyakarta, Pusat Studi Pancasila UGM hlm 251

⁷Syamsu Alam, A. 2012 “ Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.1 No. 3 Juni 2012

program sosial, mereka juga memperluas program-program sosial mereka⁸. Pentingnya pembangunan sosial dewasa ini menjadi perhatian global. Konferensi tingkat tinggi dunia oleh PBB tentang pembangunan sosial, yang dilaksanakan di Copenhagen pada tahun 1995, menetapkan pendekatan pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang berusaha untuk menghubungkan program-program sosial secara langsung dengan usaha-usaha pembangunan ekonomi.

Kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan membuat kebijakan sosial, salah satunya adalah kebijakan tentang jaminan sosial masyarakat. Jaminan yang umumnya diberikan berupa jaminan kesehatan, dan bantuan sosial yakni bantuan uang untuk kelompok miskin. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar tiap manusia. Kesehatan juga mempengaruhi tingkat mutu pembangunan manusia di suatu daerah, semakin sehat masyarakat akan menciptakan dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan peningkatan tingkat produktivitas di suatu daerah atau wilayah. Kesehatan juga merupakan hak asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial maupun politik. Kesehatan memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek lainnya seperti pendidikan, perekonomian dan lain-lain sehingga jika pembangunan kesehatan tidak terpenuhi dapat mempengaruhi aspek-aspek lainnya sehingga dapat menghambat pembangunan nasional. Konstitusi bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia yang tertulis dalam pasal 34

⁸ Fahrudin, Adi, 2013, "Kesejahteraan Sosial Internasional" Bandung, Alfabeta

ayat 3 bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak⁹. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan hak seluruh rakyat sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Untuk menjamin pemeliharaan kesehatan setiap masyarakat pemerintah mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat, yang tertulis dalam pasal 34 ayat 2 untuk memenuhi hak rakyat atas jaminan sosial untuk pengembangan diri demi mencapai kesejahteraan di dalam pasal 28 H ayat 3. Dengan jaminan sosial masyarakat lebih merasa terlindungi dari pengeluaran-pengeluaran tak terduga akibat kecelakaan ataupun penyakit yang dapat mengganggu pendapatan untuk kehidupannya yang dapat menimbulkan kesukaran ekonomi.

Pembangunan kesehatan memiliki keterkaitan dengan pembangunan nasional maka dari itu pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dalam pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan¹⁰. Perhatian Global terhadap pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan dilakukan dengan adanya amanat resolusi *World Health Assembly* (WHA) ke 58 tahun 2005 yaitu pertemuan para anggota *World Health Organization* (WHO) di Jenewa yang menginginkan tiap negara mengembangkan *Universal Health Coverage* (UHC) bagi seluruh penduduk yakni perlindungan kesehatan untuk masyarakat¹¹. Indonesia sebagai anggota WHO bertanggung jawab untuk menjamin

⁹Undang-Undang Dasar 1945

¹⁰Musramadoni, "Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Dr. Rasidin Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2014)

¹¹<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-Indonesia-2015.pdf> Profil Kesehatan Indonesia 2015 (2015) hlm 89 diunduh pada tanggal 6 Februari 2017

perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia yang di laksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) .

Jaminan sosial lainnya yaitu bantuan sosial bagi kelompok miskin. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Banyak aspek yang melatarbelakangi perlu adanya penanggulangan kemiskinan, antara lain aspek kemanusiaan, aspek ekonomi, aspek sosial dan politik, serta aspek keamanan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dilihat dari penyebab maupun dampak yang ditimbulkan. Kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal penyebab kemiskinan adalah keadaan individu, keluarga atau komunitas masyarakat yang dipandang dari rendahnya pendidikan dan pendapatan. Faktor eksternal penyebab kemiskinan antara lain adalah kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi¹². Penanggulangan masalah kemiskinan dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan tersebut antara lain adalah dengan memberikan bantuan sosial, seperti bantuan uang dan barang. Tujuan dari pemberian bantuan yang berupa uang dan barang tersebut adalah sebagai bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 ayat 1 tertulis bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara. Bentuk pemeliharaan negara terhadap fakir atau kelompok miskin tersebut salah satunya adalah dengan memberika bantuan sosial untuk pemeliharaan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan dasarnya.

¹²Iqbal, Hasbi, 2008, “*Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus*” Universitas Dipenogoro

BPJS Kesehatan dan BLT merupakan beberapa kebijakan sosial yang dikeluarkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengatasi permasalahan sosial dalam pemerintahannya khususnya masalah jaminan kesehatan masyarakat dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program bantuan kepada masyarakat miskin, program BLT diselenggarakan pada tahun 2005, 2008, dan 2013. Program tersebut dilakukan untuk merespons kenaikan harga BBM yang dapat mengakibatkan inflasi bagi masyarakat, BLT bertujuan sebagai bantuan biaya bagi rakyat miskin untuk menghadapi kenaikan biaya hidup akibat naiknya biaya hidup karena kenaikan BBM. Terdapat beberapa perbedaan kebijakan BLT pada tahun 2005 dengan tahun 2008 mulai dari dasar peraturan, penerima manfaat, jumlah bulan, periode pembayaran, nominal pembayaran, dan verifikasi data.:

Tabel 1.1

Perbedaan BLT 2005 dan BLT 2008

No	Uraian	BLT 2005	BLT 2008
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dasar Peraturan	Inpres no: 12 tahun 2005	Inpres no: 3 tahun 2008
2	Penerima Manfaat	Rumah Tangga Miskin (RTM)	Rumah Tangga Sasaran (RTS)
3	Jumlah Bulan	12 bulan	7 bulan
4	Periode Pembayaran	4 kali	2 kali
5	Nominal Pembayaran	Rp 300.000,-/periode	Rp 300.000,- dan Rp 400.000,-
6	Verifikasi Data	BPS	PT. Pos Indonesia

Sumber : BPS tahun 2006 dan Departemen Sosial 2008

Berjalannya program kebijakan BLT memiliki kontroversi di dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan BLT dianggap tidak efektif dalam mengentaskan

permasalahan kemiskinan, merupakan program jangka pendek, bantuan yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaan bantuan dari masyarakat, dan memancing masyarakat untuk masuk dalam budaya konsumerisme¹³. Kebijakan BLT sebagai kebijakan yang populis di masa pemerintahan SBY dianggap memiliki maksud politis di dalamnya untuk menarik dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Keluarnya kebijakan BLT pada tahun 2008 merupakan manipulasi politik untuk meningkatkan popularitas dan memobilisasi massa pemilih pada pemilu presiden tahun 2009. Kritik terhadap kebijakan BLT ini disampaikan oleh Mulyadi Sumarto, dosen FISIPOL UGM dan peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM yang melihat kebijakan BLT pada tahun 2008 tidak diperlukan karena tidak relevannya alasan distribusi BLT. Kenaikan harga BBM akibat pengurangan subsidi dan munculnya kesulitan ekonomi akibat kenaikan BBM menjadi alasan adanya distribusi BLT. Alasan tersebut tidak relevan karena adanya penurunan harga BBM dan tidak adanya kesulitan ekonomi akibat kenaikan BBM. Mulyadi menyebutkan adanya manipulasi politik dalam pengelolaan administratif program BLT yang mencakup jangka waktu, jumlah penerima, data yang dipakai, metode distribusi, dan landasan hukum BLT. Manipulasi tersebut merupakan indikasi pembelian suara dan menjadi alat pendongkrak suara bagi SBY dalam pemilu presiden¹⁴. Menurut Mulyadi

¹³[http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Bantuan_Langsung_Sementara_Masyarakat_\(B_LSM\)_201220130130123620.pdf](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Bantuan_Langsung_Sementara_Masyarakat_(B_LSM)_201220130130123620.pdf) diunduh pada tanggal 18 Maret 2017

¹⁴<http://cpps.ugm.ac.id/manipulasi-program-blt-untuk-memenangkan-pilpres-2009/> diunduh 18 Maret 2017

Pelaksanaan BLT pada tahun 2014 dilakukan untuk meningkatkan citra partai Demokrat dalam menghadapi pemilu tahun 2014¹⁵.

BPJS Kesehatan merupakan kebijakan sosial lainnya pada pemerintahan SBY, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sendiri mengalami sejarah panjang dalam prosesnya perkembangannya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menjawab permasalahan jaminan kesehatan di Indonesia dan menjawab tuduhan “Negara Tanpa Jaminan Sosial”. Proses Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 memakan waktu yang cukup lama mulai dari di sahkan dan diundangkan. Berawal dari sidang Tahunan MPR RI tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid memberikan pernyataan tentang Pengembangan Konsep SJSN. Pernyataan Presiden tersebut direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang Undang-Undang Jaminan Sosial (UU JS) oleh Kantor Menko Kesra (Kep. Menko Kesra dan Taskin No. 25KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000, tanggal 3 Agustus 2000, tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional). Proses penyempurnaan terus dilakukan hingga disahkan oleh Presiden Megawati pada tanggal 14 Oktober 2004¹⁶. Pembentukan Badan Penyelenggara diperlukan untuk menjalankan UU SJSN, maka dari itu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

BPJS Kesehatan merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pedoman untuk

¹⁵<http://politik.news.viva.co.id/news/read/409951-ugm--kompensasi-bbm-subsidi-dongkrak-citra-demokrat-diunduih> pada 18 Maret 2017

¹⁶<http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> diakses pada tanggal 6 Februari 2017

menjalankan pelayanan BPJS Kesehatan semakin jelas dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional¹⁷. Kebijakan BPJS Kesehatan diberlakukan pada akhir pemerintahan SBY juga menuai kontroversi dalam pelaksanaannya, Pembentukan BPJS sebagai badan penyelenggara dinilai terlalu lama melihat sudah diberlakukannya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada tahun 2004. Program kebijakan BPJS Kesehatan memiliki maksud politis di dalamnya, mulai dari klaim program tersebut adalah kado atau warisan dari pemerintahan SBY, sampai penggunaan BPJS sebagai alat untuk menarik dukungan dari masyarakat. Klaim program kebijakan BPJS sebagai program *SBY Care* di kritik oleh anggota DPR komisi IX dari fraksi PKS, Indra yang menyatakan sangat tidak beralasan dan tidak layak nya klaim SBY terhadap program BPJS, pemerintah dianggap mempolitisasi program BPJS dengan memanipulasi kenyataan. Program BPJS bukan merupakan RUU inisiatif dari presiden melainkan RUU dari DPR, pembahasan RUU BPJS memakan waktu lama dari pemerintah menunjukan tidak menunjukan adanya kepedulian (care) dari pemerintah¹⁸. Program BPJS dijadikan alat politik bagi SBY untuk menghadapi pemilu 2014. Dalam kampanye partai Demokrat, SBY menonjolkan program BLT dan BPJS sebagai bukti dari keberhasilan pemerintahannya dalam menjalankan program pro rakyat, program BPJS tersebut

¹⁷Andita, Wenny, 2016, "*Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur*", Universitas Hassanudin

¹⁸<http://news.okezone.com/read/2014/01/06/339/922464/pks-berang-program-bpjs-diklaim-sby> diunduh pada tanggal 18 Maret 2017

dijadikan alat kampanye SBY untuk mendongkrak citra partai Demokrat yang terpuruk.¹⁹. Revisi Surat Edaran Direksi BPJS No. 0055 Tahun 2014 tentang pengiriman surat pelanggan kepada peserta penerima bantuan iuran (PBI) menerima kritik karena dianggap dapat digunakan untuk kampanye partai politik. Dalam surat edaran tersebut terindikasi adanya penekanan peran SBY dalam kebijakan BPJS. Penekanan SBY di dalam surat edaran tersebut dianggap bernuansa politis dan dinilai mengarah pada kampanye terselubung karena dalam surat tersebut menunjukan peran besar dari SBY terhadap pembentukan BPJS

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, kebijakan tidak pernah terlepas dari aspek politik. Kebijakan sosial yang berupa filantropi seperti BLT dan BPJS Kesehatan juga memiliki tujuan politis. Baik dari perencanaanya, pemanfaatanya, maupun penempatan waktu kebijakan dan sebagainya, kebijakan memiliki maksud dan tujuan politik di dalamnya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendapatkan dukungan kepada pembuat kebijakan tersebut dan untuk mencapai tujuan politik dari pembuat kebijakan. Peneliti tertarik untuk melihat aspek politik dari kebijakan sosial khususnya BLT dan BPJS Kesehatan pada masa pemerintahan SBY dari penempatan waktu keluarnya kebijakan (*Political Timing*). Oleh karena itu peneliti memberi judul untuk penelitian ini: ***Political Timing : Analisis Politik Kebijakan Sosial (BLT dan BPJS Kesehatan) Pemerintahan Era Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2014***

¹⁹<http://demokrat-diy.or.id/?p=988> diunduh pada tanggal 18 Maret 2017

1.2. Rumusan Masalah

Penentuan rumusan masalah diperlukan untuk memberikan arah dan pedoman dalam mencari jawaban dari permasalahan .berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang akan diangkat di teliti akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Politik Timing* kebijakan sosial (BLT dan BPJS Kesehatan) pada era pemerintahan SBY tahun 2004-2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan *Political Timing* kebijakan sosial (BLT dan BPJS Kesehatan) yang dikeluarkan pada era pemerintahan SBY tahun 2004-2014

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibagi menjadi dua sisi yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang berjudul *Political Timing : Analisis Politik Kebijakan Sosial (BLT dan BPJS Kesehatan) Pemerintahan Era Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009* diharapkan dapat berguna

sebagai sumbangan pemikiran di dunia pendidikan dan penyelesaian permasalahan sosial dan politik yang berkaitan dengan Kebijakan Sosial serta bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan terkait aspek politik dalam pembuatan kebijakan serta menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pemerintah, Dan bagi masyarakat penelitian dapat menambah wawasan terkait aspek politik didalam kebijakan sosial dan masyarakat dapat mengawasi serta mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang jaminan kesehatan masyarakat.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Teori Kebijakan dan Politik Kebijakan

Pemahaman tentang definisi tentang kebijakan diperlukan untuk memperjelas pemikiran dalam pembahasan. Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintahan yang bukan hanya dalam arti Government yang mengatur tentang aparatur pemerintahan melainkan juga governance yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik²⁰. Kebijakan (*policy*) adalah sebuah kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu

²⁰Suharto, Edi, 2011, "*Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*", Bandung, Alfabeta, , hlm 3

mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan. Setiap masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang dicapai dengan usaha bersama memerlukan rencana-rencana yang dituangkan dalam kebijakan oleh pihak berwenang dalam hal ini pemerintah²¹.

Kebijakan dapat dibedakan menjadi kebijakan publik dan kebijakan privat²². Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan teori kebijakan publik. Pada dasarnya terdapat banyaknya batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Perbedaan definisi timbul karena masing masing ahli memiliki latar belakang yang berbeda²³. Definisi mengenai kebijakan publik menurut Bridgman dan Davis (2005:3), kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*” yang berarti kebijakan publik adalah “apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”²⁴. Menurut definisi tersebut kebijakan publik dapat diartikan sebagai segala sesuatu tindakan yang akan dilakukan pemerintah dalam menyikapi suatu masalah publik. Masalah secara formal dapat di definisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang

²¹Budiarjo, Miriam, 2008, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Jakarta, Gramedia, hlm 20

²²Simatupang, Pandjar, “*Analisis Kebijakan : Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/ART01-1a.pdf> diakses pada tanggal 9 Februari 2017

²³Winarno, Budi, 2016, “*Kebijakan Publik Era Globalisasi*”, Yogyakarta ,Center of Academic Publishing Service, hlm 19

²⁴Suharto, Edi, *Op.cit*

menginginkan pertolongan atau perbaikan. Suatu masalah akan menjadi masalah publik apabila ada orang atau kelompok yang menggerakkan kearah tindakan guna mengatasi masalah tersebut ²⁵ . Sedangkan James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh aktor dan faktor dari luar pemerintah.²⁶

Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yakni: Pertama dikenal dengan istilah analisis kebijakan dan kedua kebijakan publik politik (Hughes, 1994:145).²⁷ . Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik, Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kebijakan tersebut tidak dapat terlepas dari aspek politik, langkah-langkah yang di ambil dalam proses kebijakan tersebut selalu masuk kedalam pertimbangan politik.

Tidak terlepasnya aspek politik dalam sebuah kebijakan disebabkan banyaknya tawar menawar kepentingan-kepentingan dari para pemegang kepentingan. Aktifitas tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu : penyusunan agenda,

²⁵Winarno, Budi, *Op.cit.* hlm 74

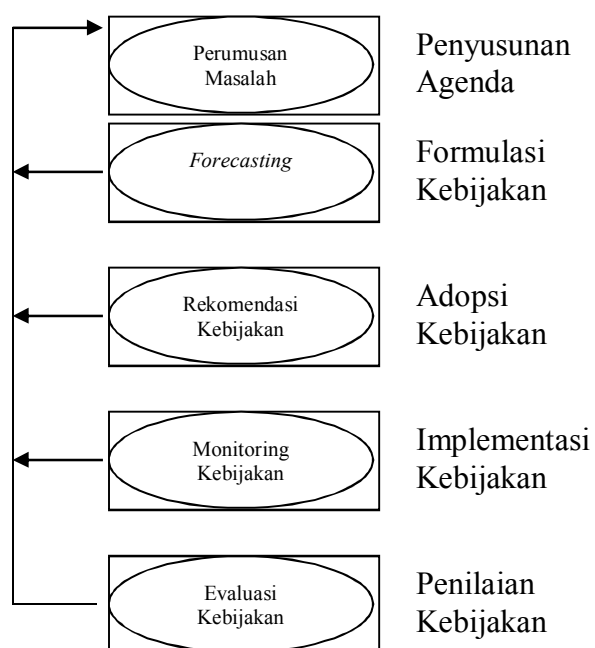
²⁶Subarsono, AG. (2013), *Analisis Kebijakan Publik : Konsep , Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal 2

²⁷*Ibid*,hal 4-5

formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan²⁸. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual²⁹.

Bagan 1.2

Proses Kebijakan Publik



Sumber : William N. Dunn, 1994:17
Tahap-tahap dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut

- Tahap Penyusunan

Penempatan masalah di masukan pada agenda publik oleh para pejabat yang telah dipilih dan diangkat. Masalah masalah yang diangkat telah melalui kompetisi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan

²⁸Dunn, William N, 2000, "*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*",Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 22

²⁹Subarsono,AD,*Op.Cit*, Hal 8

- Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah agenda yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan untuk mencari pemecahan masalah terbaik yang berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Pada tahapan ini para aktor mengusulkan pemecahan masalah terbaik

- Tahap Adopsi Kebijakan

Dalam tahapan ini pengambilan alternative kebijakan diambil untuk pemecahan masalah. Alternative kebijakan diadopsi dengan dukungan mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan

- Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan . kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus dilaksanakan. Pada tahap implementasi kebijakan berbagai kepentingan akan saling bersaing . beberapa implementasi akan didukung oleh para pelaksana, namun beberapa implementasi mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

- Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah mampu untuk memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya

untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat³⁰

1.5.2. Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah dalam merespon isu-isu yang bersifat public, yakni mengatasi masalah-masalah sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kebijakan sosial sendiri adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia melalui program dan pelayanan sosial. Kebijakan sendiri memiliki fungsi preventif (pencegahan) untuk mencegah masalah sosial, fungsi kuratif (penyembuhan) untuk mengatasi masalah sosial dan fungsi pengembangan (*developmental*) untuk mempromosikan kesejahteraan sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. Bentuk dari kebijakan sosial tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan saja, kebijakan sosial juga dapat berbentuk program-program pelayanan sosial dan sistem perpajakan sebagai instrumen kebijakan³¹.

Salah satu bentuk kebijakan sosial adalah program pelayanan sosial. Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat didefinisikan sebagai salah satu kebijakan yang ditujukan untuk mempromosikan kesejahteraan beberapa pelayanan sosial adalah jaminan sosial dan pelayanan kesehatan. Jaminan

³⁰ Winarno, Budi, 2012, "*Kebijakan Public (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*", Yogyakarta ,Center of Academic Publishing Service, hlm 36-37

³¹ Suharto, Edi, *Op.Cit* hlm 11

sosial (*social security*) adalah sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*)³². Jaminan sosial di beberapa negara pada umumnya menyangkut asuransi sosial dimana tunjangan diberikan sesuai kontribusinya yang biasanya adalah pembayaran premi. Contoh asuransi sosial berupa asuransi kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, dan kematian. Beberapa negara lain jaminan sosial juga merupakan bantuan sosial kepada kelompok-kelompok miskin tanpa mempertimbangkan kontribusinya.

Pelayanan kesehatan merupakan aspek penting dalam kebijakan sosial. Kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Pelayanan kesehatan bukanlah monopoli dari pemerintah saja, seperti halnya jaminan sosial pelayanan kesehatan publik sebagian besar diperuntukan bagi warga yang kurang mampu. Skema pelayanan kesehatan publik biasanya erat kaitannya dengan sistem jaminan sosial, terutama asuransi sosial, karena sebagian pelayanannya menyangkut atau berbentuk asuransi kesehatan. Selain pemerintah dalam pelayanan kesehatan publik juga mencakup kepemilikan rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan, termasuk penetapan kebijakan terhadap penyelenggara dan penyedia perawatan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta³³.

Kebijakan BLT dan BPJS Kesehatan merupakan kebijakan sosial yang merupakan wujud dari pemenuhan hak-hak warga negara dari pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang

³²Ibid, hlm 16

³³Ibid, hlm 17

berupa tunjangan uang terhadap masyarakat miskin dan jaminan kesehatan yang berbentuk asuransi sosial dari pemerintah.

Kebijakan sosial yang dikeluarkan pada pemerintahan SBY bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan sosial untuk menjamin kebutuhan kesehatan masyarakat. Kebijakan sosial merupakan kebijakan yang dapat menarik dukungan dari masyarakat kepada pemerintah karena merupakan pemenuhan hak hak masyarakat sehingga lebih menarik perhatian masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan sosial yang filantropi para era pemerintahan SBY tersebut tidak terlepas dengan aspek politik yang dijadikan sebagai pertimbangan dan alat untuk mendapatkan keuntungan politik.

1.5.3. Political Timing

Konsep kekuasaan memiliki keterkaitan dengan proses politik, dalam ilmu politik terdapat sejumlah konsep yang berkaitan dengan konsep kekuasaan (*power*), seperti pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, tekanan, dan kewenangan. Kekuasaan secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan pihak yang mempengaruhi. Secara lebih sempit, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan

keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya.³⁴

Pelaksanaan kekuatan politik untuk mencapai tujuan dapat dikaji dengan beberapa faktor yang meliputi bentuk dan jumlah sumber kekuasaan, distribusi sumber kekuasaan, kapan seseorang dan kelompok menggunakan sumber-sumber, dan hasil penggunaan sumber-sumber kekuasaan. Faktor-faktor tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana kekuasaan dapat dilaksanakan secara efektif. Sumber kekuasaan dikategorikan menjadi sarana kekuasaan fisik, kekayaan, harta benda (ekonomi), normative, jabatan, keahlian, informasi, status sosial, popularitas pribadi, dan massa yang terorganisasi³⁵. Sumber-sumber kekuasaan perlu untuk didistribusikan kedalam masyarakat untuk mendapatkan hasil yang efektif. Sumber-sumber kekuasaan tidak pernah terdistribusikan secara merata karena kemampuan orang yang bervariasi, faktor lain yang perlu dipertimbangkan yaitu adalah persepsi masyarakat terhadap sumber kekuasaan yang ada. Selain distribusi sumber-sumber, penggunaan sumber-sumber kekuasaan merupakan salah satu faktor yang penting. Penggunaan sumber-sumber kekuasaan dapat digunakan untuk mempengaruhi proses politik maupun non politik, baik itu dalam mempertahankan kekuasaan, mendapatkan dukungan dan mencapai tujuan politik. Menurut Adrain, empat faktor yang biasanya dipertimbangkan oleh pemilik sumber kekuasaan dalam menggunakan sumber untuk

³⁴ Surbakti, Ramlan, Op.Cit. hlm 73

³⁵ Ibid, hlm 81

mempengaruhi sumber untuk memengaruhi proses politik meliputi kuatnya motivasi untuk mencapai tujuan tertentu, harapan akan keberhasilan mencapai tujuan, persepsi mengenai biaya dan resiko yang timbul dalam mencapai tujuan, dan pengetahuan mengenai cara-cara mencapai tujuan tersebut³⁶. Faktor terakhir dari pelaksanaan kekuasaan politik adalah hasil dari penggunaan sumber-sumber kekuasaan. Hasil yang diharapkan dari penggunaan sumber-sumber adalah tercapainya tujuan politik dari pemilik kekuasaan yang meliputi jumlah individu yang dikendalikan, bidang bidang kehidupan yang dikendalikan, dan kedalaman pengaruh kekuasaan yang salah satunya adalah mendapatkan dukungan dari masyarakat³⁷

Penempatan waktu dalam pelaksanaan kebijakan juga merupakan cara-cara untuk mempengaruhi proses politik untuk mencapai tujuan politik dari pemerintah melalui kekuasaan yang dimiliki dalam menempatkan waktu kebijakan. Penempatan waktu dalam suatu peristiwa politik (political event) tidak di tetapkan secara acak (non-random) tetapi dipengaruhi oleh para politisi/pemegang kepentingan. Para pemegang kepentingan atau para politisi mempengaruhi waktu kebijakan untuk memaksimalkan keuntungan politik yang di dapat dan meminimalisir biaya dan resiko politik. Politisi menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam menempatkan waktu dari suatu peristiwa politik untuk meningkatkan perhatian publik terhadap dampak positif tindakanya untuk

³⁶ Ibid, hlm 88

³⁷ Ibid, hlm 90

menarik dukungan dari masyarakat dan mengurangi perhatian publik terhadap dampak negatif dari tindakanya yang dapat meningkatkan resiko politik yang diterima³⁸. Terdapat beberapa hipotesis tentang perilaku politisi yang berkaitan dengan penempatan waktu politik antara lain:

1. *Packaging* (Kemasan)

Pemerintah atau politisi dengan kewenangannya akan mengemas peristiwa politik untuk mendapatkan keuntungan politik yang besar dengan mengatur penempatan waktu peristiwa politik tersebut

2. *Splitting* (Memisahkan)

Pemerintah atau politisi memisahkan penempatan waktu peristiwa politik yang beresiko buruk dengan yang baik untuk mengurangi resiko yang didapat dari peristiwa politik tersebut.

3. *Hilighting* (Sorot)

Pemerintah atau politisi memperhatikan penempatan waktu dari sebuah peristiwa politik untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat untuk kejadian positif yang dapat memberikan keuntungan politik atau mengurangi perhatian masyarakat dari kejadian negatif yang dapat menimbulkan kerugian politik.

4. *Phasing* (Tahapan)

Tahapan waktu dalam peristiwa politik diperhatikan oleh pemerintah maupun politisi untuk mendapatkan keuntungan politik

³⁸ Gibson, John 1999, "Political Timing (A Theory of Politicians' Time Events)" *Journal of Theoretical Politics* 11(4):471-496, London, Sage Publications hlm 471

yang besar untuk mencapai tujuan politiknya dengan cara meningkatkan rasio pemberitaan tentang respon positif yang diberikan masyarakat.³⁹

Timing adalah salah satu keterampilan politik yang hebat dan mempengaruhi sejauh mana pembuat kebijakan dapat mempengaruhi lingkungan eksternal ke dalam mana tindakan kebijakan diluncurkan. Mobilisasi dukungan untuk memasukkan masalah dalam agenda (sebelum meluncurkan sebuah kebijakan) adalah komponen penting dari model pengaturan agenda yang semakin bermanfaat dan canggih. Timing dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, terutama, untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak terkoordinasi. Timing juga diperlukan untuk menghindari upaya peluncuran kebijakan tanpa terlebih dahulu mengatur dasar agenda yang dapat menciptakan sebuah risiko politik yang signifikan atau mengatur agenda untuk sebuah kebijakan yang tidak diluncurkan, yang akan membuatnya tampak seperti tindakan bodoh.⁴⁰

Timing politik dilakukan untuk mendapatkan respon yang positif dari masyarakat sehingga dari kegiatan atau event politik tersebut dapat menciptakan dukungan politik terhadap politisi. Dalam penelitian ini pemerintahan SBY menggunakan sumber-sumber kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi proses politik yaitu untuk mendapatkan

³⁹ Ibid, Hlm 481

⁴⁰ Kay, Adrian, 2006, "The Dynamic Of Public Policy : Theory and Evidence", Northampton, Edward Edgar Publishing. Inc hlm 26

dukungan dari masyarakat melalui kebijakan kebijakan sosial yang dikeluarkannya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan SBY juga tidak terlepas dari penempatan waktu dari kebijakan-kebijakan sosialnya yang telah diatur dengan peristiwa-peristiwa politik yang ada seperti pemilihan umum dan pemilihan presiden untuk mendapatkan keuntungan politik secara maksimal sehingga dapat mencapai tujuan politik yang diinginkan.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan pengertian dari konsep yang digunakan dalam penelitian, yang diuraikan oleh peneliti dengan mengacu pada kerangka teori/konsep yang telah dirumuskan sebelumnya.

- **Political Timing**

Penempatan waktu dalam pelaksanaan kebijakan juga merupakan cara-cara untuk mempengaruhi proses politik untuk mencapai tujuan politik dari pemerintah melalui kekuasaan yang dimiliki dalam menempatkan waktu kebijakan. Para pemegang kepentingan atau para politisi mempengaruhi waktu kebijakan untuk memaksimalkan keuntungan politik yang di dapat dan meminimalisir biaya dan resiko politik.

1. *Packaging* (Kemasan)

Pemerintah atau politisi dengan kewenangannya akan mengemas peristiwa politik untuk mendapatkan keuntungan politik

yang besar dengan mengatur penempatan waktu peristiwa politik tersebut

2. Splitting (Memisahkan)

Pemerintah atau politisi memisahkan penempatan waktu peristiwa politik yang beresiko buruk dengan yang baik untuk mengurangi resiko yang didapat dari peristiwa politik tersebut.

3. Highlighting (Sorot)

Pemerintah atau politisi memperhatikan penempatan waktu dari sebuah peristiwa politik untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat untuk kejadian positif yang dapat memberikan keuntungan politik atau mengurangi perhatian masyarakat dari kejadian negatif yang dapat menimbulkan kerugian politik.

4. Phasing (Tahapan)

Tahapan waktu dalam peristiwa politik diperhatikan oleh pemerintah maupun politisi untuk mendapatkan keuntungan politik yang besar untuk mencapai tujuan politiknya dengan cara meningkatkan rasio pemberitaan tentang respon positif yang diberikan masyarakat .⁴¹

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

⁴¹ Ibid, Hlm 481

Desain penelitian adalah suatu rencana bagaimana mengumpulkan dan mengolah data agar data penelitian yang diharapkan akan tercapai⁴². Penelitian tentang *Political Timing*: Analisis Politik Kebijakan Sosial (BLT dan BPJS Kesehatan) Pemerintahan Era Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2014 ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya⁴³. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Sedangkan pemahaman deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada⁴⁴. Desain penelitian ini digunakan oleh peneliti dalam menganalisis dan mengkaji fenomena fenomena yang terjadi pada penepatan waktu kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan para era pemerintahan SBY.

Peneliti juga menggunakan pendekatan *Critical Discourse Analysis* atau Analisis Wacana Kritis (AWK). Pendekatan ini baru dipelajari untuk sebagai metode penelitian. Pendekatan baru ini membuka perspektif luas untuk memecahkan permasalahan

⁴² Sujarweni, V. Wiratna, 2014, "*Metodologi Penelitian*" Pustakabaru press, Yogyakarta hlm 26

⁴³ Prof. Dr. Nyoman Dantes. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi. (Hlm.51).

⁴⁴ Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. (Hlm. 23)

ketidakadilan, dominasi atau diskriminasi. Metode AWK memungkinkan penggunaan beragam cara: pertama, bisa melakukan analisis konteks; kedua, bisa menggunakan teknik pengamatan atau wawancara yang menekankan cara merekam dan menerjemahkan bahasa alamiah; ketiga, dengan model pengambaran partisipatoris yang menuntut peneliti berperan di komunitas sehingga bisa mempelajari proses wacana; keempat, menggunakan informan atau pakar untuk menjelaskan atau menerjemahkan apa yang terjadi di komunitas dengan tetap menghormati praktik wacana yang ada; kelima, bisa menggunakan metode framing, bahkan bisa juga metode etnografi⁴⁵

1.7.2. Situs Penelitian

Dalam penelitian ini situs penelitian yang akan diteliti adalah stakeholder pembuat kebijakan sosial pada pemerintahan SBY dan para ahli kebijakan publik. Melalui penelitian yang dilakukan di instansi tersebut yang tentunya maka peneliti diharapkan dapat memperoleh informasi-informasi yang berkenaan dengan penelitian ini.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan dapat menceritakan apa yang ia ketahui tentang sesuatu

⁴⁵ Haryatmoko, 2016, “ *Critical Discourse Analysis* (Analisis Wacara Kritis) Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan”, Jakarta, Rajawali Pers hlm 1, 17

yang berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah :

1. Politisi atau DPR-RI pada masa pemerintahan SBY (Ketua DPR-RI Komisi IX 2009-2014, Ketua Pansus UU BPJS, dan Tenaga Ahli Komisi IX DPR-RI)
2. Peneliti Kebijakan (Peneliti SMERU, Center for Regulation Policy and Governance (CRPG), dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM)

1.7.4. Jenis Data.

Menurut Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain⁴⁶. Data-data tersebut terdiri dari pembicaraan-pembicaraan atau data lisan tulisan tulisan (tulisan media, surat menyurat, kebijakan pemerinta, notulen rapat, dan lain-lain), aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh orang, isyarat-isyarat yang diberikan oleh orang dan ekspresi fisik seperti raut muka ketika marah dan gembira⁴⁷. Data yang diambil dalam penelitian political timing kebijakan sosial SBY ini berupa kata kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto serta diagram statistik yang relevan dengan tema penelitian yang di peroleh dari subjek dan objek penelitian.

⁴⁶ Dr. Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Bandung : Remaja Rosdakarya. (Hlm. 112)

⁴⁷ Afrizal, 2016, “Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)”, Jakarta ,Rajawali Pers, hlm 18

1.7.5. Sumber Data

Pada penelitian *Political Timing* : Analisis Politik Kebijakan Sosial (BLT dan BPJS Kesehatan) Pemerintahan Era Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2014 bersumber dari :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari lapangan pada objek penelitian. Data primer merupakan hasil dari wawancara mendalam dengan informan dan observasi penelitian yang dicatat langsung oleh peneliti

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi pendukung penelitian yang didapatkan melalui data data tidak langsung seperti dokumen-dokumen yang didapatkan selama penelitian, buku, media, dan literatur-literatur yang dapat mendukung data primer.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai informasi penelitian yaitu :

1. Wawancara Mendalam (Indeph Interview)

Wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu menanyakan pertanyaan dengan format terbuka, mendengarkan, dan merekamnya dan kemudian menindaklanjuti dengan pertanyaan tambahan yang terkait⁴⁸. Dalam wawancara mendalam peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali.⁴⁹

2. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen notulen rapat, surat menyurat dan laporan laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam⁵⁰.

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Mudjiaraharjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab⁵¹. Miles dan Huberman (1994)⁵²

⁴⁸ Michael Quinn Patton. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Bab 5. Yogyakarta. (Hlm.182)

⁴⁹ Sujarweni, V. Wiratna, *Op.cit.* hlm 32

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Sujarweni, V. Wiratna, *Op.cit.* hlm 34

⁵² Dr. Basrowi, M.Pd. Dr. Suwandi, M.Si., 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. (Hlm.209).

mengemukakan bahwasannya teknik analisis data itu mencakup tiga kegiatan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung dari awal sampai akhir penelitian (selama penelitian dilakukan) untuk memperoleh data yang benar-benar valid dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta membuang data yang tidak perlu. Reduksi data ini penelitian benar-benar menyangsikan kebenaran data yang diperoleh dan akan dicek ulang kembali dengan informan lain yang di rasa peneliti lebih mengetahui.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap ini peneliti juga melakukan display (penyajian) data secara sistematis agar interaksi antar bagian mudah dipahami dalam konteks yang utuh berdasarkan klasifikasi tema-tema ini. Tujuannya adalah agar memudahkan membaca dan menarik kesimpulan sehingga sajian datanya harus tertata secara rapi.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan berarti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap

data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Kemudian setelah itu adalah membuat laporan hasil penelitian yang lengkap.

1.7.8. Kualitas Data

Pada penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber data. Triangulasi dengan sumber data berarti dengan cara membandingkan dan mengecek kebenaran informasi yang didapat dari satu sumber dengan sumber yang lain. Hal tersebut dapat dicapai jalan⁵³ :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang – orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang-orang dari berbagai elemen masyarakat
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Dengan memperhatikan proses dan temuan dalam triangulasi tersebut nantinya akan menjadi bahan yang dapat membantu penyempurnaan data. Untuk kesempurnaan penelitian, maka dilakukan

⁵³ Moelong Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. (Hlm. 330)

perbandingan atas data-data yang diperoleh, tambal sulam yang dilakukan untuk memenuhi indikator-indikator dalam menganalisis sehingga hasil penelitian yang berupa data dapat disajikan dengan baik